

PERKADERAN BAGI REAKTUALISASI ISLAM YANG BERKEMAJUAN¹

Oleh: Asep Purnama Bahtiar²

Kalau menyimak narasi “Islam yang berkemajuan” yang begitu populer di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, sangat boleh jadi kemunculannya bukan seketika sebagai idiom baru. Frasa yang memikat dan sekaligus dapat mengikat ini sejatinya merupakan respons kognitif dan bentuk kesadaran pendiri Muhammadiyah atas problematika umat pada zamannya. Dengan demikian kosakata, terminologi, idiom, dan pepatah-petitih kreasi Persyarikatan ini selalu bersenyawa atau memiliki argumentasi mendasar dengan kepentingan dinamika Muhammadiyah sesuai konteksnya.

Hampir satu abad yang lalu, narasi tersebut tertuang dalam bahasa Jawa, yang--mengutip Kuntowijoyo (2001)--termuat dalam majalah *Swara Moehammadiyah* No. 2 Tahun I/1915, “*Awit miturut paugeraning agami kita Islam, sarta cocok kaliyan pikajenganipun jaman kemajengan.*” Hemat saya, dari ungkapan itulah rumusan “Islam yang berkemajuan” diambil dan kemudian menjadi karakter utama gerakan Muhammadiyah.

Dengan demikian, membaca risalah pergerakan Muhammadiyah abad kedua sekarang pun tidak mungkin kalis dari spirit Islam yang berkemajuan itu, lebih-lebih dalam konteks peradaban utama yang sedang dibincangkan untuk dibangun di tengah tarik-menarik kepentingan ideologi dan

¹Disampaikan pada Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 5-7 Ramadhan 2011/5-7 Agustus 2011.

²Asep Purnama Bahtiar, S.Ag., M.Si., Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010-2015); Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Kepala Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial Politik UMY.

pandangan hidup lain dewasa ini. Rumusan “Islam yang berkemajuan” tersebut bukan saja basik dan prinsip sebagai pancang untuk bergerak, tetapi juga visi dan orientasi untuk mengayuh biduk organisasi dengan pasti.

Pandangan tersebut sangat kuat dan menyatu pada sosok pendiri Persyarikatan, karena Muhammadiyah yang didirikannya bukan sekedar sebuah organisasi semata, tetapi sebuah gerakan dengan idealisme Islam dan spirit kemajuan yang berpijak pada realitas. Rumusan awal *statuten* Muhammadiyah (1912 dan 1914) misalnya, selalu menyandingkan penyebaran pengajaran atau dakwah Islam dengan kemajuan. Karena itu Muhammadiyah—dengan jiwa dan pilar gerakannya--berada dalam ruang dan waktu yang juga selalu bergerak, baik dalam konteks lokal, nasional, regional dan global.

FENOMENA KONTRAPRODUKTIF

Zaman yang bergerak tentu menimbulkan konsekuensi dan risiko bagi semua unit dan entitas yang ada di dalamnya, termasuk Muhammadiyah. Dalam konteks ini bisakah narasi besar “Islam yang berkemajuan” itu masih “laik tanding dan laik sanding” dengan zaman yang tak kunjung surut, sementara kondisi internal Muhammadiyah seakan-akan kehilangan daya dukungnya?

Pertanyaan di atas tidak bisa diabaikan karena beberapa hal di Persyarikatan sudah menjadi fenomena, atau paling tidak, simptom yang kontraproduktif dengan visi dan spirit Muhammadiyah yang berkemajuan tadi. *Pertama*, masih banyak yang memandang Muhammadiyah itu sebatas sebuah organisasi. Pandangan seperti ini selain mereduksi hakikat dan

identitas Muhammadiyah, juga bisa mengakibatkan tokoh atau warga Muhammadiyah mudah berpaling ke organisasi lain atau partai politik yang suka memeralat dakwah. Bila Muhammadiyah dipahami hanya sekedar sebagai organisasi, lantas apa bedanya dengan organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan lain yang gampang muncul dan juga mudah tenggelam. Muhammadiyah itu bukan sekedar sebuah organisasi, karena organisasi itu merupakan alat, sarana dan cara untuk menata dan mengatur berbagai unsur, jaringan dan sumberdaya yang dimiliki.

Dalam Bermuhammadiyah dan memahami Muhammadiyah jangan dilupakan substansi dan identitasnya yang terdalam, yakni Islam dan idealismenya yang berkemajuan. Menurut M. Djindar Tamimy (1990), "...lahirnya Muhammadiyah dari tiada menjadi ada, didorong oleh paham almarhum KH A. Dahlan tentang 'Apakah agama Islam itu?'...Maka untuk dapat memahami Muhammadiyah yang sebenarnya harus dimulai dari memahami Islam yang sebenarnya. Sanggup menghayati Islam yang sebenarnya. Mau mengamalkan Islam yang sebenarnya dan bersemangat untuk memperjuangkan Islam yang sebenarnya. Kalau orang hendak memahami Muhammadiyah akan tetapi tidak berangkat dari pemahaman yang semacam itu, maka ia hanya akan menemukan Muhammadiyah sebagai organisasi. Tidak bakal mengenal idealismenya."

Kedua, semakin menggejalanya persepsi dan anggapan yang parsial dan sektoral dalam struktur kepemimpinan. Sebagai contoh, Bermuhammadiyah (baca: melaksanakan program atau menjalankan aktivitas kegiatan) dipahami sebatas posisinya dalam struktur pimpinan Persyarikatan, majelis atau lembaganya saja. Seolah program atau kegiatan itu bukan agenda Persyarikatan Muhammadiyah yang didistribusikan

kepada setiap majelis dan lembaga sesuai fungsi dan wewenangnya. Implikasi yang terjadi antara lain, majelis dan lembaga berjalan sendiri-sendiri dan sulit untuk melakukan koordinasi dan kerjasama program lintasmajelis. Bahkan yang fatal lagi terjadi pengambilalihan program dan kegiatan oleh majelis yang bukan menjadi tugas dan otoritasnya.

Ketiga, gejala pemahaman berorganisasi yang tidak utuh dan menyeluruh secara internal. Memprihatinkan kalau seorang pimpinan Persyarikatan tidak memahami atau tidak mau tahu dengan hubungan struktural-konsekuensial antara Muhammadiyah dengan organisasi otonom dan amal usaha Muhammadiyah. Begitu juga dengan Ortom yang tidak mengindahkan kaidah dan peraturan organisasi yang lebih tinggi. Akibatnya, potensi Ortom (terutama AMM) tidak bisa didayagunakan sebagai pilar perkaderan dan sumber regenerasi. Demikian juga janggal ketika Pimpinan Muhammadiyah tidak berdaya mengontrol AUM-nya sesuai aturan Persyarikatan; orang yang bekerja di AUM atau menjadi pimpinannya menganggap tidak ada hubungan struktural-organisatoris dan kewajiban moral dengan Muhammadiyah.

Keempat, “memperalat” Muhammadiyah untuk kepentingan kelompoknya atau memperlemah legitimasi Persyarikatan untuk meraup keuntungan sendiri (seperti kepentingan politik, ekonomi, dan jabatan). Sebagai contoh, alangkah absurdnya jika otoritas keputusan dan legitimasi peraturan Persyarikatan dilemahkan dan disalah-salahkan oleh pendapat individu karena motif ekonomi dan kepentingan pribadinya. Begitu juga alangkah tidak eloknya jika struktur formal-legal Persyarikatan dilecehkan oleh kelompok-kelompok tidak resmi dengan memanipulasi “stempel”

Muhammadiyah atau mencuri-curi momentum demi kepentingan ekonomi dan keuntungan materi oknum-oknum tertentu. Sama halnya tidak etis kalau wibawa organisasi digadaikan untuk meraih kekuasaan politik; atau tradisi luhur Persyarikatan diluruhkan dengan kebiasaan ghibah dan fitnah, mendiskreditkan tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk menaikkan popularitas pribadi dan membangun dominasi kelompok yang diklaimnya paling pantas dan absah untuk menjadi elite dan pimpinan.

Kelima, kenyamanan terjebak pada romantisme masa lalu di Ortom atau OKP lain. Dalam struktur Pimpinan Persyarikatan disadari tidak semua orang yang diberi amanah di dalamnya itu berlatar belakang sama dari satu Organisasi Otonom, tetapi dari beberapa Ortom Muhammadiyah bahkan ada yang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau organisasi kemahasiswaan di luar Muhammadiyah seperti PII dan HMI. Tidak bisa dimungkiri jika orang-orang yang pernah aktif di organisasi-organisasi itu masih menyimpan kenangan atau romantisme yang terbawa-bawa ketika sudah menjadi bagian dari Pimpinan Persyarikatan atau Unsur Pembantu Pimpinan.

Namun seringkali romantisme masa lalu itu menjadi berlebihan, dan kemudian membentuk sikap eksklusif dengan menghimpun orang-orang yang sama latar belakang Ortom-nya atau OKP-nya dalam struktur Pimpinan Persyarikatan, majelis atau lembaga. Minimal menjadi kelompok dominan. Akibatnya orang-orang seperti ini lupa bahwa ada mantan-mantan pimpinan atau aktivis Ortom lainnya di Muhammadiyah; dan mereka menjadi tidak sadar bahwa sekarang ini sudah berada di Rumah Besar Muhammadiyah, bukan lagi di Ortom atau OKP lainnya. Sikap dan cara berorganisasi ini tidak

sehat untuk mengembangkan Persyarikatan, karena mengabaikan potensi sumberdaya kader lainnya. Akibatnya, muncul cara-cara bermuhammadiyah dengan menggunakan kacamata Ortom atau OKP lainnya.

MENGUBAH FENOMENA KONTRAPRODUKTIF

Kembali ke topik utama tentang “Islam yang berkemajuan”, maka fenomena kontraproduktifnya tadi harus diubah. Sekali lagi, Islam yang berkemajuan tadi perlu penandasan ulang yang seksama dan cara pandang bermuhammadiyah yang utuh. Mengingat ulang gagasan Islam yang berkemajuan versi KH Ahmad Dahlan menjadi bersanding pas ketika Prof. Taufik Abdullah dalam kesempatan diskusi terbatas di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta (April 2010) menyatakan, “ideologi yang dominan pada awal abad ke-20 adalah ideologi kemajuan.”

Pada diri KH Ahmad Dahlan, ideologi kemajuan itu menjadi modus penerjemahan nilai-nilai Islam atau obyektifikasi ajaran Islam ke dalam bentuk agenda pencerahan, pemajuan, dan pencerdasan kehidupan umat serta kerja-kerja kemanusiaan lainnya yang inklusif. Alam pikiran modern yang dibangun dalam Persyarikatan dengan nilai-nilai prinsipil yang dipegang kukuh dalam prinsip menghasilkan tradisi tindakan dan etos kerja sebagai wujud riil dan amal saleh dari ajaran Islam. Dus, risalah pergerakan Muhammadiyah sumbernya adalah ideologi kemajuan atau Islam yang berkemajuan.

Revitalisasi gerakan Muhammadiyah langgamnya selalu merepresentasikan Islam yang berkemajuan, sebagaimana telah dirintis oleh KH Ahmad Dahlan. Pemurnian dan pembaruan yang menjadi watak tajdid

Muhammadiyah selalu hadir dan menyatu dalam dinamika pergerakannya. Langgam gerakan Muhammadiyah ini menunjukkan wajah Islam yang selalu bergerak dan menggerakkan serta hidup dan menghidupkan dalam realitas kehidupan umat manusia, tanpa harus kehilangan identitasnya yang orisinal dan rujukan historisnya yang autentik.

Dengan demikian, pengabaian terhadap berbagai sikap dan tindakan yang tidak patut – seperti yang terbaca pada lima fenomena kontraproduktif tadi--dalam Bermuhammadiyah akan melahirkan tradisi buruk di kalangan pimpinan dan warga Persyarikatan. Di samping organisasi menjadi berjalan tidak sistemik dan tanpa koordinasi, juga akan terjadi pembusukan dari dalam. Akibat lebih jauh, energi dan sumberdaya Persyarikatan akan tersita oleh hal-hal yang tidak produktif dan melelahkan.

Berpijak pada persoalan seperti itulah, maka cara pandang baru dalam Bermuhammadiyah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Boleh jadi cara pandang ini sudah ada sebelumnya, tetapi tidak terwariskan atau dilupakan. Cara pandang baru dimaksud adalah membangun pemahaman dan kesadaran tentang Bermuhammadiyah yang utuh dan menyeluruh dengan selalu mempertimbangkan konteks di seputarnya yang tidak statis. Harus diingat, keberadaan suatu organisasi tidak bisa lepas dari lingkungan dan konteks yang menjadi ranah dan ruangnya untuk bergerak, baik yang berskala lokal, nasional, regional, maupun global.

Dengan pemahaman dan kesadaran Bermuhammadiyah yang utuh dan menyeluruh tadi, ketika disebutkan Muhammadiyah maka dalam alam pikiran kita terbayang dinamika sebuah organisasi dengan identitas dan ideologi kemajuannya, pemimpin dan anggota serta simpatisannya, sistem

dan strukturnya, kebijakan dan peraturannya, agenda dan programnya, majelis dan lembaganya, serta Ortom dan AUM-nya yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan sudah memiliki beberapa cabang istimewa di berbagai belahan dunia. Inilah cara pandang yang tidak parsial dan parokial, dengan tetap bisa memahami dinamika dan problematika Muhammadiyah sesuai dengan konteks dan level areanya.

Karena terkait dengan konteks dan lingkungan, maka bisa dipilah ada masalah Muhammadiyah yang skupnya lokal, nasional, atau regional. Namun begitu tetap digarisbawahi bahwa masalah dan kasus di suatu daerah yang bersifat lokal bisa jadi ikut dipengaruhi oleh konteks nasional atau regional, dan bahkan global.

REAKTUALISASI MELALUI PERKADERAN

Perkaderan sebagaimana dirumuskan dalam sistem yang dimiliki Muhammadiyah senantiasa didesain sebagai sarana atau instrumen untuk menginternalisasikan Islam yang berkemajuan kepada warga dan pimpinan Muhammadiyah. Di samping itu, perkaderan juga merupakan upaya untuk terbangunnya revitalisasi kader dengan karakter Islam yang berkemajuan tersebut.

Sebagai wadah dan sekaligus ruang, dalam sebuah organisasi terkandung tiga komponen utama: pemimpin, kader dan anggota. Dengan demikian, dinamika suatu organisasi dan masa depannya tidak bisa lepas dari keberadaan anggota dan kader, di samping selalu terkait dengan fungsi kepemimpinan dan sistem yang dimilikinya. Hal yang sama juga berlaku

bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu perhatian terhadap anggota dan kader, termasuk melalui pemberdayaan dan pendaayagunaannya, menjadi bagian yang melekat dari program dan agenda Persyarikatan Muhammadiyah yang berkesinambungan.

Terkait dengan hal ini, sejak dini KH Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah telah memikirkan posisi strategis dan fungsi dari keberadaan kader dan anggota bagi kelangsungan eksistensi Muhammadiyah. Masa depan organisasi ini akan ikut ditentukan dari keseriusan dan ketelatenan dalam membina dan memberdayakan para kader serta anggotanya. Di abad kedua yang baru dijalaninya ini pula Muhammadiyah perlu merumuskan terobosan-terobosan baru yang strategis, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia atau revitalisasi kader dan anggotanya.

Tanfidz Keputusan Muktamar ke-46 (2010) menggarisbawahi rencana strategis program nasional bidang kaderisasi dalam kalimat: *“Membangun kekuatan dan kualitas pelaku gerakan serta peran dan ideologi gerakan Muhammadiyah dengan mengoptimalkan sistem kaderisasi yang menyeluruh dan berorientasi ke masa depan.”* Ada tiga kata kunci dalam rencana strategis tersebut: pelaku gerakan; ideologi gerakan Muhammadiyah; dan sistem kaderisasi. Khusus yang diistilahkan dengan “pelaku gerakan” cakupan subjeknya terdiri dari: pemimpin, kader, dan anggota/warga Persyarikatan.

Dalam ruang lingkup dan dinamika gerakan Muhammadiyah, maka secara organisatoris ketiga subjek tersebut saling membutuhkan dan pengaruh-mempengaruhi. Misalnya, seorang pemimpin pasti membutuhkan anggota/warga, baik sebagai basis legitimasi kepemimpinan maupun untuk

kepentingan pelibatan mereka dalam berbagai program dan agenda kerja yang sudah dirancang. Terlebih lagi posisi kader, maka keberadaannya juga lebih strategis dan menentukan bagi kemajuan organisasi. Nilai lebih ini karena kader menempati posisi signifikan di antara pemimpin dan anggota: sebagai tenaga pendukung tugas pemimpin serta menjadi penggerak dan pendinamis aktivitas partisipatif anggota/warga.

Keputusan Tanwir Muhammadiyah 2007 telah menyatakan beberapa poin yang berkaitan dengan kaderisasi: 1). Setiap Pimpinan Persyarikatan dan amal usaha harus mengikuti proses perkaderan Persyarikatan; 2) Meningkatkan peran AUM sebagai bagian dari sistem kaderisasi; 3). Pengelola PTM/AUM harus merupakan tenaga profesional sekaligus kader Muhammadiyah dalam aturan yang jelas; 4). Perlu adanya aturan yang jelas tentang prasyarat kekaderan calon pimpinan Persyarikatan dan pengelola amal usaha.

Kemudian dalam Keputusan Tanwir 2009 tentang Rekomendasi dan Asal-Usul ditegaskan pula tiga poin yang berkaitan langsung dengan masalah perkaderan: 1). Menjadikan perkaderan (dalam berbagai jenis dan bentuknya) sebagai budaya organisasi di Muhammadiyah; 2). Memperluas peran AUM (pendidikan, kesehatan, ekonomi) bagi kepentingan dakwah dan perkaderan serta implementasi nilai-nilai Islam yang berkemajuan bagi kemaslahatan publik; 3). Syarat calon Pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan untuk masa yang akan datang harus sudah pernah mengikuti perkaderan utama.³

³**Perkaderan utama** adalah kegiatan kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta aksi gerakan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Persyarikatan atau MPK di setiap struktur pimpinan. Perkaderan ini dilaksanakan dengan standar kurikulum yang baku dan waktu

Revitalisasi kader dan anggota merupakan sebuah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan vitalitas, daya juang, dan kualitas kader serta menjaga ruh ber-Muhammadiyah melalui berbagai macam pembinaan, pelatihan, pendidikan, dan perkaderan yang terarah dan terencana. Melalui revitalisasi kader dan anggota ini, suplai kader dan anggota tidak hanya berfungsi bagi pemenuhan kebutuhan internal organisasi saja, tetapi juga peran strategisnya akan terlihat dari kemampuan kader dan anggota Muhammadiyah dalam merespons dan menyikapi dinamika perkembangan zaman.

Revitalisasi kader dan anggota pada dasarnya pula lebih menitikberatkan pada penguatan ranah idealisme, perkaderan, pemberdayaan, pemajuan dan penyantunan kehidupan bersama. Revitalisasi idealisme menyangkut penguatan aspek yang berkaitan dengan semangat (ruh, jiwa, spirit), nilai-nilai, pemikiran, dan komitmen dalam memperjuangkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Arah revitalisasi idealisme diorientasikan pada dua hal: 1) kokohnya segenap kader dan anggota Muhammadiyah dalam ber-Muhammadiyah sebagai sesuatu yang bersifat mendasar/ideal; 2) terbentuknya kemampuan dalam mewujudkan cita-cita Muhammadiyah berdasarkan nilai-nilai ideal dalam Persyarikatan.

Dengan demikian, revitalisasi kader dan anggota merupakan unsur terpenting dan terdalam dari upaya manajemen pengembangan sumberdaya

penyelenggaraannya dalam satuan waktu tertentu yang telah ditetapkan. Kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus atau kajian intensif yang terstruktur namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku untuk mencukupi kebutuhan dan fungsi tertentu dari majelis atau lembaga. **Perkaderan fungsional** dilaksanakan sebagai pendukung perkaderan utama dan guna pengembangan sumberdaya kader. Kurikulumnya dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai jenis pelatihan serta kebutuhan dan kreativitas masing-masing penyelenggara. (*Sistem Perkadern Muhammadiyah*, 2007: 44-45).

kader dan anggota. Revitalisasi kader dan anggota dilakukan dalam pelbagai bentuk kegiatan, pelatihan, dan institusi perkaderan, baik yang termasuk jenis perkaderan utama maupun fungsional.

Perlu digarisbawahi pula, bahwa upaya revitalisasi kader dan anggota dengan mengintensifkan penguatan idealisme dan berbagai macam perkaderan tadi dituntut untuk memperhatikan aspek-aspek lainnya yang dinamis dan juga penting seperti yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dsb. Sehingga arti penting lain dari revitalisasi kader dan anggota adalah memiliki *link and match*, baik ke dalam maupun ke luar, berupa keterkaitan dan keselarasan kualifikasi dan kompetensi kader dan anggota Muhammadiyah dengan tuntutan kebutuhan internal Persyarikatan, maupun kemestian untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kecakapan berorganisasi agar mampu merespons perubahan sosial yang menyertai dinamika umat dan bangsa dalam percaturan global. Melalui upaya perkaderan inilah, antara lain, reaktualisasi Islam yang berkemajuan itu bisa dilakukan.[]